

BAB III

TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI HONG KONG DAN ARAB SAUDI

Dalam bab ini, membahas angka kekerasan dan jenis-jenis kekerasan yang dialami oleh para pekerja migran yang ada di Hong Kong dan Arab Saudi khususnya di daerah penempatan atau negara tujuan para PMI.

A. Kekerasan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia di penempatan

Permasalahan PMI terjadi pada proses awal pemberangkatan bahkan sampai dengan proses pemulangan dari negara PMI bekerja ke tanah air. Hingga saat ini, permasalahan yang di hadapi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri tidak pernah terselesaikan. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan agar para tenaga kerja Indonesia di luar negeri tidak lagi mendapatkan tindak kekerasan dengan cara membuat Undang-undang perlindungan tenaga kerja Nomor 39 tahun 2004 dan merevisi UU tersebut menjadi UU Nomor 18 tahun 2017 tentang PPMI, mengeluarkan Surat Keputusan Menakertrans Nomor 157/MEN/2003 tentang asuransi Perlindungan PMI di luar negeri, menandatangani perjanjian kerjasama penempatan PMI (MOU) dengan beberapa negara penerima PMI, serta adanya tim advokasi untuk para PMI diluar negeri, namun PMI masih sering mendapatkan kekerasan baik

dalam pemberangkatan, penempatan serta pemulangan ketanah air. Ketika PMI sudah berada di negara penempatan, maka hukum tertinggi adalah hukum yang berlaku yang berada di negara penempatan, sehingga pemerintah Indonesia dan PMI secara legal harus tunduk kepada hukum yang berlaku di negara tujuan (Sejati, 2015).

Kekerasan yang lebih banyak dialami oleh para PMI adalah ketika berada di penempatan. Permasalahan penempatan biasanya terkait dengan diskriminasi dan eksploitasi yang rentan dialami oleh pekerja migran perempuan (BNP2TKI, Laporan Pemantauan HAM pekerja Migran, 2010). Menurut Bobi Alwi Ma'arif selaku ketua SBMI macam-macam bentuk kekerasan yang di alami oleh PMI adalah:

1. Marginalisasi (penyudutan terhadap pekerja dengan cara pemberian upah hanya sebagian).
2. Subordinasi (selalu dianggap lebih lemah).
3. Stereotype (pelecehan terhadap pekerja perempuan).
4. Kekerasan. Kekerasan yang di alami oleh PMI sangat banyak antara lain adalah :
 - a. Mendapatkan hukuman dan marahan dari agen PMI karena tidak dapat bekerja sepenuhnya sesuatu waktu dan kontrak yang ditentukan. Perlakukan penerima kerja yang sangat semena-mena kepada PMI.

- b. Sering mendapatkan perbedaan upah antara pekerja migran laki-laki dan perempuan.
- c. Perbedaan perlakuan dan resiko (kekerasan berlapis bagi pekerja perempuan). Dan bagi yang menjadi PRT, tidak boleh memegang paspor sendiri, upah lebih rendah dan tidak mempunyai waktu untuk libur. Sering mendapatkan hinaan dan cibiran.
- d. Bekerja lebih dari satu tempat dan tidak sesuai dengan kontrak, serta bekerja dengan *overtime* (lebih dari 12-20 jam/ hari) namun tidak mendapatkan gaji tambahan. Pemotongan gaji.
- e. Tidak mendapatkan tempat tinggal yang memadai dan tidak mendapatkan fasilitas untuk tidur dan tidak mendapatkan makanan yang cukup dan tidak memiliki standar gizi.
- f. Tidak mendapatkan alat keselamatan dan keamanan bekerja.
- g. PMI di panggil dengan sebutan budak Indonesia. Sumber :
Wawancara 1

B. Kekerasan terhadap PMI yang ada di Hong Kong dan Arab Saudi.

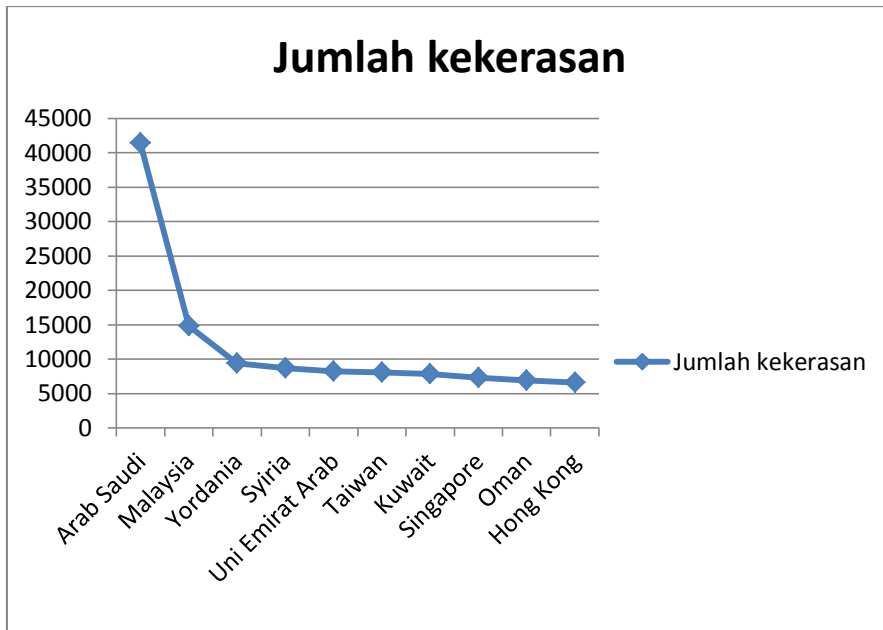
Arab Saudi dan Hongkong adalah termasuk 5 negara terbesar yang menjadi tujuan pengiriman para pekerja migran Indonesia dan masuk ke dalam 10 negara yang tingkat kekerasannya tinggisecara fisik dan non fisik (BNP2TKI, 2017). Kekerasan yang terjadi disetiap negara disebabkan oleh peraturan-peraturan untuk melindungi para pekerja

migran pada setiap negara terdapat perbedaan. Misalnya di Arab Saudi para pekerja migran menjadi hak milik dari majikan sehingga negara tidak dapat mengintervensi wilayah privasi tersebut, karena Arab Saudi adalah negara yang menganut sistem kafalah, dimana pemerintah tidak mempunyai hak untuk ikut campur dengan urusan warga negaranya yang bersifat privat (Fatawati, 2016). Data tabel dibawah ini adalah jumlah kasus kekerasan yang terdapat pada beberapa negara tujuan.

Tabel 6. 10 Negara terbesar tujuan pengiriman pekerja migran Indonesia.

No	Negara	Kasus Kekerasan
1	Arab Saudi	41.412
2	Malaysia	14.807
3	Yordania	9.357
4	Syiria	8.675
5	Uni Emirat Arab	8.234
6	Taiwan	8.035
7	Kuwait	7.845
8	Singapore	7.280
9	Oman	6.909
10	Hongkong	6.590

Sumber: 10 negara terbesar tingkat kekerasan terhadap domestic workers (PMI) bnp2tki. 2018



Grafik 1. 10 Negara tujuan terbesar tingkat kekerasan terhadap PMI
 Sumber: 10 negara terbesar tingkat kekerasan terhadap domestic workers (PMI) bnp2tki. 2018

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa tingkat kekerasan terhadap PMI yang ada di Hong Kong jauh lebih rendah dibanding tingkat kekerasan yang diterima oleh para PMI yang ada di Arab Saudi. Dapat dilihat dalam tabel 7, jumlah kekerasan yang ada di Arab Saudi dari tahun 2011 sd. 2017 mencapai 41.412 kasus/ kekerasan, sedangkan angka kekerasan terhadap PMI yang ada di Hong Kong dari tahun 2011 sd. tahun 2017 mencapai 6.590 kasus/ kekerasan. Adapun kekerasan yang didapat oleh PMI yang ada di Arab Saudi dan Hongkong yakni (BNP2TKI, 2017) :

1. Permasalahan dan Tindak kekerasan terhadap PMI yang ada di Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara yang menjadi tujuan terbesar ketiga para PMI setelah negara Malaysia dan Taiwan. Dari tabel 2, dapat dilihat bahwa sebanyak 138,438 PMI yang ada di Hong Kong. Semakin banyak PMI yang dikirim ke negara tujuan maka akan ada kemungkinan tingkat kekerasan di suatu negara tujuan juga akan tinggi. Dan hal ini terbukti dan terjadi pada negara Arab Saudi. Tingkat kekerasan terhadap di negara Arab Saudi berada di urutan pertama. Arab Saudi menjadi negara “Zona Merah” untuk para PMI, karena tingkat kekerasannya. Dari 2011 hingga 2017 kekerasan terhadap PMI yang ada di Arab Saudi mencapai 41.412 kekerasan. Kekerasan terhadap PMI di Arab Saudi sangat tinggi baik dalam pra penempatan, penempatan dan pasca pemulangan (BNP2TKI, 2017).

Ketika PMI ditempatkan di negara tujuan, tentunya banyak kekerasan yang didapat oleh para PMI yang ada di Arab Saudi. Agus Gia menyatakan bahwa:

“sebagian besar kekerasan yang dialami oleh para PMI dilakukan oleh majikannya sendiri, karena ketika seseorang bekerja sebagai domestic workers di Arab Saudi, maka seorang pekerja itu dianggap menjadi hak milik majikan karena Arab Saudi menganut sistem kafalah.” (Wawancara 2)

Sehingga, karena masyarakat Arab Saudi menganut sistem kafalah maka PMI sangat rentan mengalami kekerasan dipenempatan yang dilakukan oleh majikan, dimana para pekerja migran yang bekerja di sektor *domestic* dianggap budak majikan.

Sekjen SBMI, Bobi Alwi Ma'arif menyatakan bahwa kekerasan yang diterima oleh para PMI di Arab Saudi ketika dipenempatan yakni (Wawancara 1):

- a. Meninggal ditempat kerja, hal ini biasanya disebabkan karena PMI mendapatkan kekerasan seperti dipukul, disiksa oleh majikan sehingga mengalami sakit yang cukup parah dan bisa mengakibatkan meninggal dunia.
- b. Mendapatkan vonis hukuman mati. PMI di tanah air juga sering mendapatkan vonis hukuman mati. Terkadang terjadi *misunderstanding* antara majikan dengan pekerja, selain itu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para PMI yang mengakibatkan mereka diberikan vonis hukuman mati, seperti majikan meninggal, mencuri atau membunuh anak majikan.
- c. PMI sakit. Adapun PMI yang mengalami sakit karena bekerja lebih dari perjanjian kontrak, sehingga hal ini membuat para PMI kelelahan dan tidak berani mengadu kepada majikan.

- d. PMI tidak dibayar, ketika telah bekerja kekerasan yang didapat oleh para PMI juga terkait dengan gaji, sering kali para PMI tidak dibayar.
- e. PMI tidak dibayar sesuai dengan perjanjian kerja/ kontrak.
- f. PMI diperkosa. Karena sebagian besar PMI yang ada di Arab Saudi adalah perempuan dan majikan menganggap bahwa setiap yang bekerja sebagai *domestic Workers* adalah budak.
- g. PMI mendapatkan pelecehan seksual. Selain diperkosa oleh majikan, ada juga PMI yang mengalami pelecehan seksual.
- h. PMI dihamili majikan.
- i. PMI dianiaya, sebagian besar PMI yang ada di Arab Saudi yakni dianiaya oleh majikan, seperti dipukul dan disiksa oleh majikan.
- j. PMI diPHK sepihak
- k. PMI mengalami kecelakaan kerja. Telah diketahui bahwa ketika bekerja sebagai *domestic worker* tentunya bekerja dibagian 3D, sehingga perlunya *safety* dalam bekerja, namun terkadang majikan tidak memberikan alat-alat untuk kewanamanan pekerja, hal inilah yang sering mengakibatkan PMI mengalami kecelakaan.
- l. Pekerjaan yang di berikan oleh majikan tidak sesuai dengan perjanjian kerja, sering kali para PMI yang bekerja sebagai *domestic worker* dipaksa oleh majikan untuk bekerja juga

ditempat kerabat nya. Sehingga hal ini membuat pekerja harus bekerja diluar perjanjian kerja.

Adapun angka kekerasan yang dididapat oleh para PMI yang ada diArab Saudi dalam penempatan dari 2011s s/d 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Kekerasan terhadap PMI yang ada di Arab Saudi dari tahun 2011 s/d 2017

Jenis Permasalahan	Tahun							Total
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
PMI meninggal di tempat kerja	70	110	51	30	49	23	12	285
PMI mendapatkan hukuman mati	43	37	26	15	8	6	3	137
PMI sakit	3.681	1.573	342	210	430	227	115	6.578
PMI tidak dibayar	1.031	1.044	378	290	211	204	178	3.336
PMI dibayar tidak sesuai kontrak	567	420	389	280	250	189	100	2.204
PMI diperkosa	255	108	35	20	10	-	-	428
Pelecehan seksual	1.282	537	110	98	77		20	2.184
PMI dihamili majikan	255	108	35	27	15	7	-	447
Penganiayaan	1.031	531	152	189	98	67	39	2.107
PHK sepihak	4.123	1.679	954	702	560	460	301	8.779
Kecelakaan kerja	354	136	33	56	49	20	10	658
Pekerjaan tidak sesuai PK	217	176	123	102	90	54	21	783
Total pertahun	12.909	6.459	2.826	2.019	1.847	1.317	799	
Total Tingkat Kekerasandi Penempatan 27.978								

Sumber : Pusat Crisis center BNP2TKI 2017 (
<https://halotki.bnp2tki.go.id>)

Dari data tabel 7, dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 sd. 2017 jumlah kekerasan yang dialami oleh para PMI sebanyak 41.412. Sebagian besar kekerasanyang dialami oleh para PMI berada

dipenempatan atau negara tujuan. Dari data tabel 8, kekerasan yang dialami oleh para PMI dari 2011 sd. 2017 sebanyak 27.978 kekerasan. Meskipun dari tahun 2011 sd. 2017 kekerasan terhadap PMI di penempatan mengalami penurunan yang sangat signifikan, namun kekerasan terhadap PMI yang ada di Arab Saudi masih berada di urutan pertama terkait dengan kekerasan yang dialami oleh para PMI.

Sebagian besar, kekerasan yang dialami oleh para PMI dipenempatan dari tahun 2011 sd. 2017 adalah PMI diPHK sepihak, dimana angka PMI yang diPHK sepihak oleh majikan sebanyak 8.779 kekerasan, selanjutnya kekerasan kedua yang sering di alami oleh para PMI di Arab Saudi adalah PMI sakit akibat bekerja yang melebihi jam kerja. Dimana kekerasan ini sebanyak 6.578 kekerasan, dan kekerasan yang berada di urutan ketiga yakni gaji yang tidak dibayar, sebanyak 3.336 kekerasan yang dialami oleh para PMI yang ada di Arab Saudi. Angka kekerasan terendah terhadap PMI yang ada di Arab Saudi yakni PMI mendapatkan hukuman mati, dari tahun 2011 sd. 2017 sebanyak 137 PMI yang mendapatkan vonis hukuman mati (HaloTKI.com, 2018).

C. Tindak kekerasan terhadap PMI yang ada di Hong Kong

Sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa PMI yang ada di Hong Kong tidak pernah mengalami kekerasan serta media masa

juga jarang memuat pemberitaan tentang permasalahan atau tindak kekerasan yang terjadi pada PMI yang ada di Hong Kong karena sangat sedikit media massa memperhatikan permasalahan di Hong Kong dan pemerintah serta pelayanan Publik lainnya lebih fokus kepada kondisi PMI yang ada di Arab Saudi dan Malaysia dari pada di Hongkong. Namun, pada kenyataannya meskipun Hong Kong dianggap surganya para PMI, tindak kekerasan terhadap PMI di Hong Kong tetap terjadi meskipun jumlah kekerasan terhadap PMI yang ada di Hong Kong tidak seperti tindak kekerasan terhadap PMI yang ada di Arab Saudi dan Malaysia (Prabowo, 2014).

Di sisi lain, tindak kekerasan yang dialami oleh para PMI muncul dari kantor perwakilan RI sendiri yang merupakan perwakilan resmi pemerintah dibawah kementrian luar negeri atau yang sering disebut dengan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong, dimana KJRI melarang para PMI untuk melakukan Kontrak Mandiri dengan majikan serta jika ingin bekerja dengan majikan harus melalui agen, padahal di dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2004 pasal 59 dan pasal 60 jelas memperbolehkan dilakukannya Kontrak Mandiri antara TKI dengan majikan yang ingin memperpanjang kontrak dengan persetujuan perwakilan RI di luar negeri (AMC, 2007).Ketua IMWU, Sring Atin menyatakan bahwa,

“sebagian dari PMI yang ada di Hong Kong juga mendapatkan kekerasan dipenempatan seperti halnya yang dialami oleh para PMI yang ada dinegara penempatan lainnya.Masih banyak majikan yang melakukan kekerasan terhadap para PMI yang bekerja kepada mereka, biasanya pekerja yang mendapatkan tindak kekerasan adalah PMI yang pertama kali atau baru bekerja di Hong Kong. Kekerasan yang biasa dialami oleh para PMI adalah pelanggaran HAM, contohnya tidak mendapatkan hak libur, penyitaan paspor dan lainnya” (Wawancara 3).

Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh para majikan terhadap para PMI di Hongkong yakni (Hesti R. Wijaya, 2015) :

1. Penyitaan paspor dan dokumen-dokumen resmi lainnya oleh agen-agen pekerja. Bentuk kekerasan ini dilakukan oleh agen-agen pekerja terhadap para PMI yang pertama kali berangkat ke Hong Kong. Hal ini membuat para PMI berbahaya ketika tinggal di negara lain, karena tidak memiliki dokumen resmi hal ini juga membuat para PMI tidak berani melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan majikan terhadap mereka ke KJRI. Serta di sisi lain ketika paspor disimpan oleh majikan atau disimpan oleh agen pekerja, maka PMI tidak akan mengetahui kapan Visa kerja nya berakhir.
2. Para PMI tidak mendapatkan hak libur / istirahat 4 kali 24 jam setiap bulan dan tidak mendapatkan hak libur nasional dan harus bekerja dengan jam kerja yang berlebihan.
3. Bekerja lebih dari perjanjian kontrak. Ada sebagian para PMI bekerja lebih dari jam kontrak, sebagian dari PMI di Hong Kong juga tidak mendapatkan hak libur mingguan secara penuh selama 24 jam akan

- tetapi mereka Cuma mendapatkan hak libur selama 10 jam hingga 13 jam.
4. Overcharging, *overcharging* adalah PMI membayar kepada agen lebih dari yang ditetapkan.
 5. Bekerja lebih jam kontrak karena merawat anak kecil dan orang tua. Merawat binatang peliharaan kucing, ajing dan burung.
 6. Terkadang PMI juga bekerja di luar kontrak atau dipaksa oleh majikan, seperti halnya bekerja di rumah kerabat majikan atau selain bekerja di rumah para PMI diminta untuk menjaga tokoh atau restoran. Namun mendapatkan gaji dibawah standar.
 7. Underpayment, para PMI mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh pemerintah Hong Kong.
 8. Tidak mendapatkan gaji, karena di potong untuk biaya agen. Terkadang agen melakukan penipuan terhadap PMI yang ada di Hong Kong dengan menahan dokumen-dokumen resmi para PMI. Dan rata-rata mereka mendapatkan potongan dari agen kurang lebih dari 7 bulan.
 9. Tidak mendapatkan gaji sesuai kontrak juga salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh para PMI di Hong Kong.
 10. PMI mendapatkan kekerasan fisik seperti dipukul menggunakan gagang sapu, hanger dan alat-alat keras lainnya.

11. PMI sakit akibat kelelahan dan masih dalam keadaan sakit ketika PMI pulang ketanah air.

12. PMI disekap oleh agen yang ada di Hong Kong

Adapun angka kekerasan yang didapat oleh para PMI yang ada di Hong Kong dalam penempatan dari 2011s s/d 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8. Kekerasan terhadap PMI yang ada di Hong Kong dari tahun 2011 s/d 2017

Jenis Permasalahan Pada Penempatan	Tahun							Total
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<i>Overcharging</i>	320	270	183	156	161	150	120	1360
Dokumen di sita Agen/ majikan	130	98	82	94	70	65	51	590
Tidak mendapat hak libur tahunan/ bulanan / mingguan.	92	87	110	100	76	79	58	602
PMI sakit	56	47	38	42	21	27	40	271
PMI tidak dibayar/ pemotongan gaji dari agen.	49	42	56	36	39	32	28	282
Underpayment	210	180	178	165	194	123	134	1184
PMI disekap	11	9	14	19	7	15	10	85
PMI mendapatkan pelecehan seksual	43	29	30	18	15	22	11	168
PMI bekerja di dua tempat	57	39	41	28	15	30	12	222
Penganiayaan	89	67	47	39	40	27	31	340
Total Pertahun	1.057	868	779	697	836	704	587	
Total Tingkat Kekerasan	5.104							

Sumber : Pusat Crisis center BNP2TKI 2017 (<https://halotki.bnp2tki.go.id>)

Dari tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa, dari 2011 sd 2017 sebanyak 6.590 tindak kekerasan yang di dapat oleh para PMI yang ada di Hong Kong.Sama halnya dengan kekerasan yang dialami oleh PMI yang ada di

Arab Saudi, kekerasan yang banyak dialami oleh para PMI di Hong Kong yakni ketika mereka berada dipenempatan atau negara tujuan. Dari 6.590 jumlah kekerasan yang dialami oleh para PMI di Hong Kong, sebanyak 5.104 kekerasan berada di penempatan atau negara tujuan. Tingkat kekerasan yang ada di Hong Kong, terbilang sangat sedikit dibandingkan 4 negara terbesar tujuan PMI lainnya. Setiap tahunnya kekerasan yang dialami oleh para PMI mengalami penurunan. Dilihat dari tabel 9 pada tahun 2011 jumlah kekerasan di penempatan sebanyak 1.057 kasus dan setiap tahunnya menurun hingga tahun 2017 kekerasan yang dialami oleh para PMI ditempatkan atau tempat tujuan sebanyak 587 kasus. Sekretaris KOTKIHO, Ratih menyatakan bahwa:

“Sebagian besar kekerasan yang dialami oleh para PMI yang bekerja di Hong Kong mendapatkan kekerasan dari pihak agen dan majikan. Ratih juga mengatakan bahwa pihak agen dan majikan bekerja sama untuk membohongi dan menipu para PMI yang ada di Hong Kong khususnya PMI yang baru pertama kali kerja di Hong Kong.”(Wawancara 6)

Dilihat dari data tabel 9, dari tahun 2011 hingga tahun 2017 kekerasan yang paling terhadap PMI adalah kasus *overcharging*. Sebanyak 1.360 kasus *overcharging*. Sangat synchron dengan hasil wawancara sekretaris KOTKIHO, karena kasus *overcharging* adalah pembayaran untuk menjadi PMI tidak sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Hong Kong dan biasanya kekerasan ini dilakukan oleh para agen dan majikan. Pembayaran dibebankan kepada para PMI lebih besar dari ketentuan pemerintah Hong Kong.

Selain dari overcharging, kekerasan yang tinggi terhadap PMI di penempatan selanjutnya adalah *underpayment*, sebanyak 1.184 kasus terjadi di Hong Kong. Menurut salah satu pengurus organisasi Lingkar Cinta Indonesia yang ada di Hong Kong yang bernama Ani Mardiani :

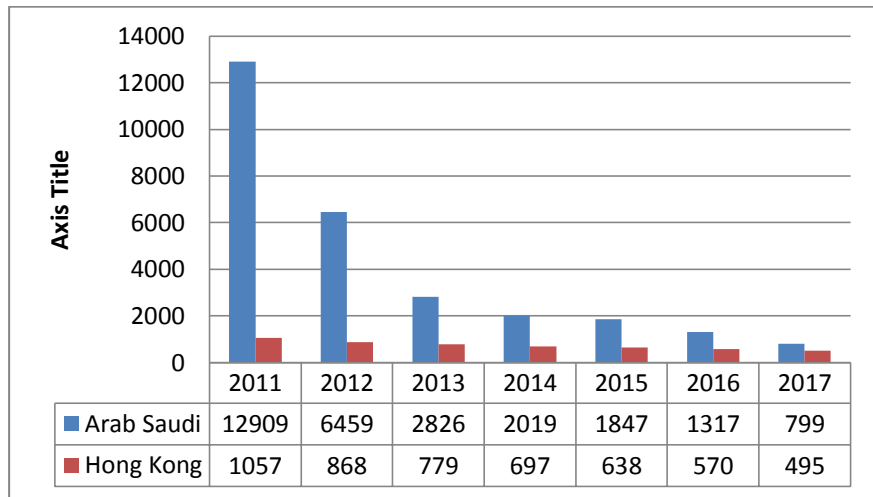
“kasus kekerasan yang banyak didapat oleh PMI adalah underpayment. Underpayment adalah pembayaran upah minimum terhadap PMI, dan biasanya kekerasan ini juga dilakukan oleh para agen dan majikan kepada PMI yang baru pertama kali kerja di Hong Kong” (Wawancara 5).

Dimana hal ini terjadi karena perjanjian yang dibuat oleh agen dan majikan tanpa sepengetahuan oleh PMI.

Selain overcharging dan *underpayment* yang menjadi kekerasan berada urutan tertinggi, bentuk-bentuk kekerasan dipenempatan yakni Dokumen disita Agen/ majikan, Tidak mendapat hak libur tahunan, bulanan atau mingguan, PMI sakit, disekap, gaji tidak dibayar atau dipotong oleh agen, mendapatkan pelecehan seksual, bekerja di dua tempat dan dianiya oleh majikan. Dan kekerasan yang paling sedikit ketika di penempatan adalah PMI disekap oleh majikan, kekerasan ini sebanyak 85 kasus dari 2011 sd. 2017. Mantan PMI di Hong Kong yang bernama Fera menyatakan bahwa:

“kekerasan yang dialami oleh para PMI yang ada di Hong Kong tidak seperti kekerasan PMI yang ada di Arab Saudi, karena para PMI di Hong Kong sangat mudah melapor ke KJRI, kepolisian Hong Kong dan silter-silter atau organisasi buruh migran di Hong Kong bahwa mereka mendapatkan kekerasan. Karena ketika PMI mendapatkan kekerasan verbal dari majikan, para PMI sudah bisa melaporkan bahwa mereka mendapatkan kekerasan, dan hingga saat ini PMI di Hong Kong belum ada yang mendapatkan vonis atau hukuman mati” (Wawancara 4).

Adapun perbandingan tindak kekerasan pada kasus penempatan yang ada di Arab Saudi dan Hong Kong setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 2. Tingkat Kekerasan terhadap PMI (Domestic Worker) di Arab Saudi dan Hong Kong

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa adanya perbedaan yang sangat signifikan terhadap kekerasan yang di alami oleh para PMI yang ada di Arab Saudi dan Hong Kong. Meskipun dari tahun ketahun adanya penurunan angka kekerasan yang di alami oleh PMI yang ada di Arab Saudi, namun kekerasan yang di alami oleh para PMI yang ada di Arab Saudi masih dianggap cukup tinggi dan dianggap berada di Zona Merah untuk para PMI.